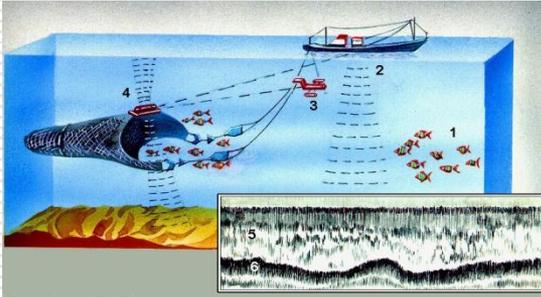


Pengelolaan SDAL oleh Pemerintah

Topik Pertemuan :

1. Arti dan Tujuan PSALP
2. Perlunya Pengelolaan oleh Pemerintah
3. Kapan Pemerintah memainkan peran setiap fungsi tersebut?
4. Model Kebijakan Pemerintah
5. Alasan Pemerintah Capur Tangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
6. Kelemahan Pengelolaan Oleh Pemerintah



Arti dan Tujuan PSALP

Arti PSALP → rezim pengelolaan sumberdaya dengan pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya.

Tujuan PSALP → Kemakmuran rakyat.

Perlunya Pengelolaan Oleh Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya diwujudkan dalam empat fungsi yaitu :

- a. Fungsi alokasi** → melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Fungsi Distribusi** → dijalankan pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul setiap orang.
 - c. Fungsi Keadilan** → dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah dalam kondisi atau situasi yang sebenarnya.
 - d. Fungsi Stabilisasi** → dilaksanakan pemerintah agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan tidak berpotensi instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.
-

Kapan Pemerintah memainkan peran setiap fungsi tersebut?

1. Dalam mengatur kondisi dan mempertahankan kondisi pasar untuk tetap bersifat kompetitif.
 2. Menghidupkan kembali transaksi atau mekanisme pasar untuk menjadi kompetitif.
 3. Melindungi dan menjalankan struktur legal dan regulasi yang telah ditetapkan.
 4. Terjadinya kegagalan pasar
 5. Menegakkan nilai-nilai sosial yang muncul atau ada di tengah masyarakat, misalnya dalam melindungi masyarakat asli serta adat dan budaya masyarakat lokal.
-

Model Kebijakan Pemerintah

Menurut Buck (1996) ada empat kategori kebijakan umum (publik) yaitu :

1. Kebijakan Distributif (*distributive policy*)
 2. Kebijakan Pengaturan Kompetisi (*competitive regulatory policy*)
 3. Kebijakan Pengaturan Perlindungan (*protective regulatory policy*)
 4. Kebijakan Redistributif (*redistributive policy*)
-

Alasan Pemerintah Capur Tangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

1. Pemerintah ikut mengelola sumberdaya alam dan lingkungan karena alasan efisiensi.
 2. Pemerintah terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan supaya keadilan dapat diwujudkan.
 3. Keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan karena alasan administrasi.
-

Kelemahan Pengelolaan Oleh Pemerintah

Ada beberapa kelemahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh pemerintah yaitu :

1. Kelebihan eksploitasi
 2. Lemahnya penegakan hukum
 3. Masyarakat dapat menghindar dari peraturan.
 4. Kebijakan terkadang saling bertentangan.
 5. Administrasi tidak efisien seperti biaya transaksi tinggi.
 6. Wewenang terbagi di beberapa lembaga atau departemen.
 7. Data dan informasi kurang benar dan akurat.
 8. Kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen.
-

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**
